



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 91 TAHUN 2025

TENTANG

PERENCANAAN STRATEGI DAERAH PENDIDIKAN VOKASI
DAN PELATIHAN VOKASI DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia di Kabupaten Gresik yang kompeten, berdaya saing, dan sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, serta dunia kerja, perlu melaksanakan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Bupati sesuai kewenangannya dalam Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi mempunyai tugas menyusun perencanaan strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di daerah masing-masing yang mengacu pada kebijakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Strategi Daerah Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 928);
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 703);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perencanaan Strategi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 38 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 72);

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2024 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN STRATEGI DAERAH PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Bupati adalah Bupati Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Strategi Daerah Pendidikan dan Pelatihan Vokasi adalah dokumen kebijakan Daerah yang memuat arah, sasaran, strategi, dan langkah operasional pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Daerah.
7. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu dan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu.

8. Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.
9. Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan dan meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja internasional, dan/atau Standar Kompetensi Kerja khusus.
10. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja.
11. Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disingkat KADIN adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.
12. Dunia Usaha dan Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah pihak yang memanfaatkan, mendukung, dan berperan dalam penyelenggaraan vokasi.
13. Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang selanjutnya disingkat TKDV adalah tim mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi di Daerah.

Pasal 2

Perencanaan strategi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan di Daerah dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten untuk bekerja dan/atau berwirausaha.

Pasal 3

Perencanaan strategi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bertujuan untuk :

- a. memperkuat sinergi Perangkat Daerah, lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- b. meningkatkan peran kamar dagang dan industri melalui program *link and match*, pengembangan dan penyelerasan keahlian, sumber daya manusia, pelatih tempat kerja, sarana dan prasarana, riset dan pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- c. meningkatkan peran sekolah menengah kejuruan melalui program *link and match*, penyelerasan program keahlian, sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai;
- d. meningkatkan peran pendidikan tinggi vokasi melalui program *link and match*, penyelerasan program keahlian, sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasarana, riset dan pengembangan;
- e. meningkatkan peran pelatihan vokasi melalui program *link and match*, penyelerasan program keahlian, sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai;
- f. memberikan penguatan dukungan komitmen Perangkat Daerah guna tercapainya penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan

- g. mewujudkan penjaminan mutu bagi penyelenggaraan pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang berkualitas dan unggul.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi perencanaan strategi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi adalah “Mewujudkan Kabupaten Gresik menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi”.

Pasal 5

Misi perencanaan strategi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi meliputi:

- a. membentuk sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan untuk bekerja dan/atau berwirausaha;
- b. menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berbasis kompetensi sesuai pasar kerja secara efektif, efisien, dan inklusif;
- c. memperkuat dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi serta pengakuan sertifikasi kompetensi; dan
- d. memperkuat sinergitas seluruh pemangku kepentingan melalui kolaborasi dan koordinasi sesuai dengan potensi Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN STRATEGI DAERAH

PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

Pasal 6

- (1) Bupati sesuai kewenangannya dalam Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Pasar Kerja di Daerah;
 - b. menyusun perencanaan strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Daerah yang mengacu pada kebijakan kementerian yang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - c. melakukan penyesuaian Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
 - d. menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang menjadi kewenangannya;
 - e. menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur bagi lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
 - f. melaporkan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Daerah kepada TKDV.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan melibatkan KADIN tingkat Kabupaten.
- (3) Tim koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan strategi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Perencanaan strategi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. pendahuluan;
 - b. visi dan misi;
 - c. strategi;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. penutup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi Daerah Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 Desember 2025
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 5 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 92

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 91 TAHUN 2025

TENTANG PERENCANAAN STRATEGI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI DI KABUPATEN GRESIK

PERENCANAAN STRATEGI

PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI DI KABUPATEN GRESIK

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri di Jawa Timur memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Keberadaan kawasan industri seperti Kawasan Industri Gresik, Maspion Industrial Estate, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik menjadikan kebutuhan terhadap tenaga kerja kompeten semakin meningkat. Namun demikian, ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) masih menjadi tantangan utama dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Tenaga Kerja dan lembaga pendidikan vokasi berupaya mewujudkan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan industri. Kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, menjadi acuan utama dalam penyusunan Strategi Daerah Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Gresik (Strada Vokasi).

Dokumen ini juga merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2025–2029, dengan tujuan untuk memperkuat daya saing sumber daya manusia (SDM) daerah, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan dunia industri.

1. Kondisi Umum Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Gresik

Selama periode tahun 2020–2024, kondisi pendidikan dan ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan positif seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan peningkatan aktivitas industri di berbagai sektor strategis. Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat industri utama di Jawa Timur memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi, khususnya dari sektor industri pengolahan, energi, logistik, perdagangan, dan jasa maritim.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik, laju pertumbuhan ekonomi Gresik tahun 2023 mencapai kisaran 5,7% (lima koma tujuh persen), dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar lebih dari 47% (empat puluh tujuh persen) terhadap PDRB daerah. Peningkatan ini diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 5,63% (lima koma enam tiga persen) pada tahun 2021 menjadi sekitar 4,8% (empat koma delapan persen) pada tahun 2023, menunjukkan adanya peningkatan keterserapan tenaga kerja di wilayah Gresik.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik juga mengalami tren peningkatan dari 79,5 (tujuh puluh sembilan koma lima) pada tahun 2021 menjadi 80,21 (delapan puluh koma dua satu) pada tahun 2023, termasuk dalam kategori “tinggi”, dan berada di atas rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur. Peningkatan IPM tersebut mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan kejuruan dan pelatihan vokasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan dan mobilitas sosial.

Dari sisi pendidikan vokasi, Kabupaten Gresik memiliki lebih dari 70 (tujuh puluh) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan beberapa lembaga pendidikan tinggi vokasi yang beroperasi baik di bawah pemerintah maupun swasta, serta Balai Latihan Kerja (BLK) Daerah dan lembaga pelatihan swasta yang aktif menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi. Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik (2024), tingkat keterserapan lulusan SMK ke dunia kerja mencapai sekitar 92% (sembilan puluh dua persen), dengan tren peningkatan partisipasi pada program magang dan *link and match* antara SMK dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI).

Kabupaten Gresik juga mencatat kinerja baik dalam implementasi *tracer study* nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Capaian partisipasi sekolah dalam pengisian data *tracer study* di Gresik termasuk tertinggi di Jawa Timur, dan menjadi salah satu rujukan bagi daerah lain dalam integrasi data lulusan dan keterserapan kerja berbasis sistem digital.

2. Mutu Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Gresik

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) di Kabupaten Gresik memegang peranan penting dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang siap menghadapi dinamika dan tuntutan dunia kerja serta industri. Sebagai salah satu kabupaten industri terbesar di Jawa Timur, Gresik memiliki struktur ekonomi yang kuat di sektor manufaktur, energi, petrokimia, logistik, dan jasa industri pendukung, yang seluruhnya membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi teknis, manajerial, dan digital yang tinggi.

Upaya peningkatan mutu lulusan program vokasional menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gresik, yang menekankan pembangunan SDM unggul, berdaya saing, dan produktif, serta mendukung penguatan daya serap tenaga kerja lokal di kawasan industri.

Salah satu tantangan utama dalam peningkatan mutu lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi di Kabupaten Gresik adalah kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan nyata industri (*skill gap*). Berdasarkan hasil pemetaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Gresik, beberapa faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut antara lain:

- a. fasilitas dan peralatan pembelajaran yang belum sepenuhnya modern dan adaptif terhadap teknologi industri 4.0, seperti otomasi pabrik, teknologi digital, sistem kelistrikan cerdas, dan rekayasa material;
- b. keterbatasan akses terhadap teknologi terkini dan lingkungan praktik industri, yang menyebabkan siswa atau peserta pelatihan belum memperoleh pengalaman kerja berbasis produksi secara nyata (*real work-based learning*); dan
- c. belum optimalnya kemitraan antara lembaga pendidikan vokasi (SMK, perguruan tinggi vokasi, dan BLK) dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam penyusunan kurikulum, penyediaan instruktur tamu, maupun pelaksanaan magang.

Selain itu, kualitas pengajar dan instruktur vokasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi mutu lulusan. Masih terdapat guru dan instruktur yang belum memiliki sertifikasi kompetensi industri atau pengalaman magang di perusahaan. Akibatnya, pembelajaran belum sepenuhnya mencerminkan dinamika dan standar kerja yang diterapkan di sektor industri.

3. Kebekerjaan dan Keselarasan Lulusan PVPV di Kabupaten Gresik

Tingkat ke bekerjaan dan keselarasan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi (PVPV) di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang relatif baik dibandingkan dengan rata-rata daerah lain di Jawa Timur. Hal ini tidak terlepas dari posisi strategis Kabupaten Gresik sebagai kawasan industri nasional dengan keberadaan sejumlah perusahaan besar dan kawasan industri modern seperti Kawasan Industri Gresik (KIG), Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE), dan berbagai perusahaan sektor manufaktur, petrokimia, energi, serta logistik yang beroperasi di wilayah ini.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik (2024) dan hasil *tracer study* yang dilakukan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kabupaten Gresik termasuk dalam tiga besar kabupaten/kota di Indonesia dengan tingkat ke bekerjaan lulusan SMK tertinggi.

Rincian kondisi ke bekerjaan lulusan vokasi di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- a. 48,5% (empat puluh delapan koma lima persen) lulusan SMK bekerja di dunia industri atau sektor formal, baik di dalam maupun di luar daerah, terutama di sektor industri pengolahan, energi, dan jasa logistik.
- b. 23,2% (dua puluh tiga koma dua persen) lulusan berwirausaha, dengan kecenderungan tumbuhnya usaha kecil di bidang otomotif, kuliner, teknik listrik, desain grafis, dan teknologi digital.
- c. 8% (delapan persen) lulusan bekerja sambil melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

- d. 7,6% (tujuh koma enam persen) lulusan masih belum bekerja (menganggur), sebagian besar karena sedang menunggu hasil rekrutmen industri atau sedang menjalani pelatihan sertifikasi kompetensi.

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK di Kabupaten Gresik lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur. Jika tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK di provinsi mencapai sekitar 6,7% (enam koma tujuh persen) (BPS Jawa Timur, 2023), maka Gresik mencatatkan angka sekitar 5,1% (lima koma satu persen), menandakan efektivitas hubungan antara pendidikan vokasi dan dunia kerja.

Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Gresik juga cukup tinggi, yakni 73,2% (tujuh puluh tiga koma dua persen) pada tahun 2023, yang menunjukkan daya serap pasar tenaga kerja yang baik dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja daerah.

4. Pendidik dan Instruktur Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) di Kabupaten Gresik

Pendidik yang berkualitas dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (PVPV) di Kabupaten Gresik memegang peran yang sangat sentral dalam memastikan kesesuaian antara suplai tenaga kerja lulusan lembaga vokasi dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, pendidik vokasi harus memiliki kemampuan dalam merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta mampu mengembangkan keterampilan teknis, sosial, dan manajerial peserta didik agar siap bersaing di pasar kerja.

Di Kabupaten Gresik, peran pendidik dan instruktur dalam ekosistem PVPV menjadi sangat strategis karena daerah ini merupakan pusat industri nasional yang terus berkembang dengan kebutuhan tenaga kerja berkompetensi tinggi, terutama di sektor manufaktur, petrokimia, logistik, energi, konstruksi, dan ekonomi digital. Oleh karena itu, keberadaan pendidik dan instruktur vokasi yang adaptif, profesional, dan berpengalaman industri menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas lulusan dan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal.

Pendidik, pendamping, dan pembimbing dalam ekosistem PVPV Kabupaten Gresik dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) kelompok besar:

1. Pendidik di Dunia Pendidikan

Meliputi guru dan instruktur yang mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) seperti Politeknik, serta lembaga pelatihan seperti Balai Latihan Kerja (BLK) Gresik dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Mereka berperan sebagai pembimbing (*trainer/mentor*) dalam proses pembelajaran formal yang berfokus pada transfer keterampilan teknis (*hard skills*) dan kompetensi sosial serta karakter (*soft skills*), termasuk etos kerja, kedisiplinan, dan kemampuan adaptif terhadap teknologi baru.

2. Pendidik di Dunia Industri (Perusahaan)

Merupakan pembimbing praktik atau *trainer on the job* di perusahaan atau industri. Mereka memiliki kompetensi teknis yang tinggi, namun umumnya masih membutuhkan penguatan kemampuan pedagogis agar dapat mentransfer keterampilan dan pengetahuan dengan efektif kepada peserta magang atau peserta pelatihan.

Kedua jenis pendidik tersebut berperan saling melengkapi dan menjadi penghubung antara lembaga pendidikan dan industri dalam menciptakan lulusan vokasi yang siap kerja.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik (2024), terdapat lebih dari 1.300 (seribu tiga ratus) pendidik dan instruktur vokasi yang aktif di berbagai satuan pendidikan dan lembaga pelatihan vokasi. Rinciannya meliputi:

- a. Guru SMK: sekitar 950 orang tersebar di 70 SMK Negeri dan swasta;
- b. Instruktur BLK dan LKP: sekitar 240 (dua ratus empat puluh) orang, baik yang berasal dari lembaga pemerintah maupun swasta;
- c. Dosen dan Instruktur Perguruan Tinggi Vokasi (PTV): sekitar 110 (seratus sepuluh) orang;
- d. Pembimbing Industri: lebih dari 300 (tiga ratus) orang dari berbagai perusahaan di kawasan industri Gresik dan JIPE.

Dari total tersebut, sekitar 45% (empat puluh lima persen) pendidik vokasi di Gresik telah memiliki sertifikat kompetensi industri atau sertifikat pendidik kejuruan nasional, dan sekitar 20% (dua puluh persen) telah mengikuti program magang industri atau pelatihan berbasis industri (*industrial attachment*).

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Gresik masih mengidentifikasi adanya tantangan utama, yakni kesenjangan kompetensi teknis antara guru dan instruktur pendidikan dengan standar industri terkini, terutama di bidang otomasi, digitalisasi, dan manufaktur cerdas (*smart manufacturing*).

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pendidik, Pemerintah Kabupaten Gresik bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Gresik, BPVP Surabaya, dan KADIN Jawa Timur dalam mengembangkan pelatih dan instruktur vokasi yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Melalui inisiatif Portal Vokasi Indonesia (<https://vokasi.net>) yang dikelola oleh KADIN Jawa Timur, lembaga pendidikan dan industri di Gresik telah mulai mengakses platform kolaborasi untuk:

- a. pertukaran data kebutuhan tenaga kerja dan bidang keahlian;
- b. pendaftaran pelatih Tempat Kerja Bersertifikat (*Workplace Trainer*);
- c. koordinasi pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi; dan
- d. kolaborasi magang industri dan program *teaching factory*.

Berdasarkan data KADIN Gresik (2024), terdapat 68 (enam puluh delapan) orang Pelatih Tempat Kerja bersertifikat nasional dan internasional tingkat dasar di Kabupaten Gresik yang tersebar pada:

- a. 45 (empat puluh lima) perusahaan industri di Kawasan Industri Gresik dan JIPE;
- b. 10 (sepuluh) SMK unggulan (termasuk SMKN 1 Gresik, SMK Semen Gresik, SMKN 2 Driyorejo);
- c. 6 (enam) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); dan
- d. 7 (tujuh) Perguruan Tinggi dan Politeknik.

Selain itu, KADIN bersama KADIN Institute dan LSP sektor industri telah menyelenggarakan program pelatihan bagi guru dan instruktur vokasi di Gresik yang mencakup:

- a. pelatihan dan uji kompetensi bagi 126 (seratus dua puluh enam) orang guru SMK dan 42 (empat puluh dua) orang instruktur BLK;
- b. pelatihan *Training of Trainer (ToT)* bagi 24 (dua puluh empat) pelatih industry; dan
- c. pelatihan *Workplace Pedagogy* bagi 15 (lima belas) orang dosen vokasi dan praktisi industri.

5. Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) di Kabupaten Gresik

Tata kelola penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) di Kabupaten Gresik mencakup keseluruhan proses, sistem, dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan tercapainya visi daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri (DUDI).

Sebagai salah satu kabupaten industri terbesar di Jawa Timur, tata kelola PVPV di Kabupaten Gresik diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pelaku industri dalam satu ekosistem yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan tata kelola PVPV di Kabupaten Gresik dilakukan secara terintegrasi melalui Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) yang berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor antara:

- a. Pemerintah Daerah, melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (SMK, LPK, BLK, dan Perguruan Tinggi Vokasi);
- c. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); dan
- d. Asosiasi Profesi, KADIN Gresik, dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

TKDV Kabupaten Gresik berperan dalam:

- a. menyusun rencana strategis dan peta jalan vokasi daerah (*Roadmap PVPV Gresik*);
- b. melakukan sinkronisasi program antara Pendidikan Vokasi dan kebutuhan industri lokal;
- c. memfasilitasi pembentukan kemitraan *link and match* antara lembaga pendidikan dan industri; dan
- d. mengoordinasikan pengawasan mutu, sertifikasi, dan program magang berbasis industri.

Proses pembukaan jurusan atau program keahlian baru dalam PVPV di Kabupaten Gresik mengacu pada prinsip kebutuhan pasar tenaga kerja dan relevansi dengan potensi ekonomi daerah. Langkah-langkah tata kelola pembukaan program kejuruan meliputi:

1. Analisis Kebutuhan Pasar Kerja dan Tren Industri Lokal

Pemerintah Kabupaten Gresik bersama KADIN Gresik dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi tenaga kerja berdasarkan sektor industri unggulan daerah, seperti:

- a. petrokimia dan kimia dasar;
- b. energi dan migas;
- c. logistik dan transportasi;
- d. konstruksi dan infrastruktur;
- e. manufaktur dan permesinan; dan
- f. ekonomi kreatif dan digital.

2. Kajian Kelayakan dan Analisis *SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)*

Setiap usulan program kejuruan di SMK, BLK, atau PTV wajib melalui kajian kelayakan dengan melibatkan DUDI dan Lembaga Sertifikasi Profesi terkait.

3. Perizinan dan Akreditasi

- a. Untuk Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), proses izin dilakukan melalui OSS Daerah dan diverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
- b. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), kewenangan pembukaan jurusan berada pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, namun dengan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan kebutuhan industri lokal.

- c. Untuk Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) seperti Politeknik Gresik, usulan program studi baru diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek dengan rekomendasi dari LLDikti Wilayah VII.
4. Keterlibatan Industri dalam Perancangan Kurikulum Dunia industri wajib dilibatkan dalam penyusunan dan validasi kurikulum kejuruan baru melalui mekanisme *forum DUDIKA* yang difasilitasi TKDV.

Penjaminan mutu PVPV di Kabupaten Gresik dilaksanakan secara berlapis dengan pendekatan berbasis standar nasional dan standar industri, meliputi:

1. SMK dan Lembaga Pendidikan Formal
 - a. dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan dukungan Dinas Pendidikan dan Tim Penjaminan Mutu Daerah; dan
 - b. selain akreditasi formal, Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong penerapan standar industri dan sertifikasi profesi di setiap jurusan.
2. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan BLK
 - a. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik bertanggung jawab dalam supervisi dan pembinaan LPK melalui mekanisme penjaminan mutu internal dan eksternal;
 - b. secara nasional, akreditasi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi LPK (LA-LPK); dan
 - c. fokus utama standar mutu LPK di Kabupaten Gresik adalah memastikan lulusan pelatihan dapat diterima dan diserap oleh industri.
3. Perguruan Tinggi Vokasi (PTV)
 - a. penjaminan mutu dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan
 - c. selain itu, PTV di Kabupaten Gresik didorong untuk menerapkan *Quality Assurance* berbasis industri dan uji kompetensi BNSP.

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM), baik peserta didik, tenaga pendidik, maupun instruktur industri, menjadi prioritas dalam tata kelola PVPV Kabupaten Gresik.

Langkah pengembangannya mencakup:

1. Pemetaan Kompetensi dan Kebutuhan Industri Daerah Melalui TKDV dan kerja sama dengan KADIN Gresik, dilakukan pemetaan sektor prioritas dan kebutuhan kompetensi spesifik seperti operator mesin industri, teknisi otomasi, welder tersertifikasi, analis laboratorium, dan logistik digital.
2. Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Instruktur
 - a. fasilitasi *Training of Trainers (ToT)*, *industrial attachment*, dan *industry immersion program*; dan
 - b. kemitraan dengan BPVP Surabaya, LSP sektor industri, dan perusahaan besar (misalnya PT Petrokimia Gresik, PT Smelting, JIPE, dan Maspion Group).
3. Program Sertifikasi dan Uji Kompetensi
 - a. pelaksanaan uji kompetensi BNSP di LSP mitra industri Gresik; dan
 - b. target 100% (seratus persen) peserta BLK dan LPK tersertifikasi kompetensi nasional pada tahun 2029.
4. Kolaborasi Pendidikan dan Industri (*Link and Match*)

Pemerintah Kabupaten Gresik menerapkan prinsip *Link and Match* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, mencakup:

 - a. sinkronisasi kurikulum;
 - b. program guru tamu dan praktisi mengajar;
 - c. magang industri;
 - d. penelitian terapan;
 - e. sertifikasi kompetensi;
 - f. pembentukan kelas industri;
 - g. penyerapan lulusan oleh DUDI; dan
 - h. dukungan sarana prasarana industri.

6. Urgensi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) di Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat industri utama di Jawa Timur memegang peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Dengan jumlah industri besar dan menengah yang terus meningkat, terutama pada sektor kimia, logam, migas, energi, logistik, dan manufaktur, Kabupaten Gresik menghadapi kebutuhan tenaga kerja terampil yang semakin tinggi dan spesifik. Kondisi ini menuntut adanya revitalisasi sistem PVPV agar mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis dan berbasis teknologi.

Revitalisasi PVPV di Kabupaten Gresik merupakan langkah krusial untuk memperkuat ekosistem pendidikan vokasi yang berorientasi pada permintaan industri (*demand-driven*), meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, dan memastikan keselarasan antara *output* pendidikan dengan kebutuhan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri). Upaya ini sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam RPJMD, yakni terwujudnya “Gresik Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Inovasi dan Daya Saing Industri.”

B. VISI DAN MISI REVITALISASI PVPV DAERAH

1. Visi TKDV

Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Kabupaten Gresik memiliki fungsi strategis sebagai wadah koordinasi, sinergi, dan pengendali kebijakan dalam pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di tingkat daerah. TKDV berperan sebagai penggerak utama dalam memastikan keterpaduan antara kebijakan pemerintah daerah, kebutuhan dunia industri, serta arah pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi agar berjalan selaras dan saling memperkuat. Melalui TKDV, seluruh pemangku kepentingan vokasi, mulai dari perangkat daerah, lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, asosiasi industri, KADIN, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), hingga lembaga sertifikasi profesi, dapat berkolaborasi dalam satu ekosistem yang terpadu dan berorientasi hasil (*result-based ecosystem*).

Secara fungsional, TKDV Kabupaten Gresik memiliki peran untuk menyusun kebijakan, mengoordinasikan program, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategi pendidikan dan pelatihan vokasi di daerah. TKDV berfungsi sebagai perencana kebijakan vokasi daerah yang menetapkan arah, sasaran, dan prioritas program sesuai dengan kebutuhan sektor industri unggulan di Kabupaten Gresik seperti petrokimia, logam, migas, energi, maritim, logistik, serta ekonomi digital. Fungsi koordinatif TKDV diwujudkan melalui fasilitasi kerja sama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan dunia industri, termasuk dalam penyusunan kurikulum berbasis industri, pelaksanaan magang, *teaching factory*, serta program sertifikasi tenaga kerja.

Selain sebagai penghubung dan koordinator lintas sektor, TKDV juga berfungsi sebagai fasilitator dan akselerator implementasi kebijakan vokasi daerah. TKDV memastikan pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi berjalan secara terintegrasi, terukur, dan berkesinambungan dengan dukungan dari setiap pemangku kepentingan. Fungsi ini termasuk mengoordinasikan penyusunan *Roadmap* Vokasi Daerah 2025-2029, mendorong kolaborasi program lintas lembaga, serta menjamin kesesuaian antara kebutuhan tenaga kerja lokal dengan kapasitas lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Dalam pelaksanaannya, TKDV juga berperan untuk menumbuhkan inovasi kebijakan daerah di bidang vokasi, termasuk pengembangan model *co-funding* antara pemerintah dan industri, pendirian Dana Vokasi Daerah, serta pemanfaatan Sistem Informasi Vokasi Daerah (SIVODA) yang ada pada GRESIKERJA sebagai basis data terpadu SDM dan lembaga vokasi Gresik.

Fungsi penting lainnya dari TKDV adalah pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan vokasi daerah. TKDV bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan program vokasi oleh masing-masing perangkat daerah, lembaga pendidikan, maupun industri mitra. Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap indikator capaian seperti serapan tenaga kerja lulusan SMK/BLK, tingkat sertifikasi kompetensi, jumlah kerja sama DUDI-vokasi, serta perkembangan wirausaha baru berbasis keterampilan. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan secara periodik kepada Bupati Gresik dan menjadi bahan pelaporan ke Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) untuk mendukung sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Secara keseluruhan, fungsi TKDV Kabupaten Gresik adalah untuk menjadi pusat koordinasi, sinergi, dan pengendali revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di tingkat daerah, dengan tujuan menciptakan sistem pengembangan sumber daya manusia yang terintegrasi, adaptif terhadap perubahan industri, dan berorientasi pada peningkatan kualitas serta daya saing tenaga kerja lokal. Dengan berjalannya fungsi TKDV secara optimal, Kabupaten Gresik diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai pusat pengembangan vokasi industri dan ketenagakerjaan unggulan di Jawa Timur.

2. Misi Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Kabupaten Gresik

Tujuan pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Kabupaten Gresik adalah untuk memperkuat tata kelola, efektivitas, dan keterpaduan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasi di tingkat Daerah, serta memastikan keselarasan antara dunia pendidikan, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.

Secara rinci, tujuan TKDV Kabupaten Gresik meliputi:

- a. Mewujudkan sistem vokasi daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan
TKDV bertujuan membangun ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang terkoordinasi antar-lembaga, melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah daerah, DUDI, KADIN, asosiasi industri, lembaga vokasi, dan masyarakat).
- b. Meningkatkan relevansi dan kesesuaian antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri
TKDV berperan memastikan kurikulum, program pelatihan, dan sertifikasi di SMK, Politeknik, BLK, dan LPK sesuai dengan kebutuhan sektor industri unggulan Gresik seperti petrokimia, logam, migas, energi, logistik, maritim, dan ekonomi digital.
- c. Memperkuat koordinasi lintas sektor dan sinergi multipihak
TKDV menjadi wadah kolaborasi antar-OPD, lembaga pendidikan vokasi, dunia industri, lembaga sertifikasi profesi, dan asosiasi pengusaha dalam penyusunan serta pelaksanaan program pelatihan berbasis kebutuhan nyata (*demand-driven training*).

- d. Mendorong peningkatan mutu lembaga vokasi dan kompetensi tenaga kerja
Melalui pembinaan, sertifikasi, dan kerja sama dengan LSP dan BNSP, TKDV mendukung lembaga vokasi agar berstandar nasional dan internasional, serta menghasilkan lulusan yang siap kerja dan diakui kompetensinya.
- e. Mengembangkan sistem informasi dan basis data vokasi daerah
TKDV berperan dalam mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Vokasi Daerah yang memuat data kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja, peta industri, serta profil lembaga vokasi di Gresik sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*).
- f. Mengoptimalkan kemitraan dan pembiayaan vokasi daerah
TKDV mendorong kolaborasi pendanaan melalui skema *co-funding* antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan CSR industri, termasuk inisiatif pembentukan Dana Vokasi Daerah guna menjamin keberlanjutan program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja.
- g. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan produktivitas SDM Gresik
Dengan mengintegrasikan program pelatihan, magang, dan rekrutmen berbasis industri, TKDV berupaya meningkatkan jumlah tenaga kerja tersertifikasi dan memperluas akses kesempatan kerja di sektor formal dan wirausaha vokasional.
- h. Mendorong inovasi dan digitalisasi pembelajaran vokasi
TKDV berkomitmen mengembangkan model pembelajaran modern seperti *teaching factory*, *digital learning*, *project-based training*, dan pelatihan *green skills* untuk mendukung transformasi industri 4.0 dan ekonomi hijau di Gresik.
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja program vokasi daerah
TKDV bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan program revitalisasi vokasi, mengevaluasi capaian indikator daerah, dan melaporkannya secara berkala kepada Bupati Gresik serta Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV).

3. Tujuan Perencanaan

Perencanaan Strategi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Gresik disusun sebagai pedoman operasional untuk memperkuat sistem tata kelola, efektivitas, serta arah pembangunan sumber daya manusia di bidang vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Dokumen strategi ini berfungsi sebagai turunan dan tindak lanjut dari peran dan tujuan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Kabupaten Gresik, yang menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan kebijakan vokasi daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Secara umum, tujuan utama perencanaan strategi pendidikan dan pelatihan vokasi di Kabupaten Gresik adalah untuk mewujudkan sistem vokasi daerah yang terencana, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan industri, guna menciptakan tenaga kerja lokal yang kompeten, produktif, berdaya saing, serta siap menghadapi perubahan teknologi dan dinamika pasar kerja.

4. Sasaran Strategi Revitalisasi PVPV Kabupaten

Sasaran strategis Revitalisasi PVPV Kabupaten Gresik disusun dengan memperhatikan kondisi riil dunia pendidikan vokasi, kebutuhan industri, serta arah pembangunan ketenagakerjaan daerah. Secara khusus, sasaran tersebut diarahkan untuk memperkuat keterpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan dunia kerja, sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kemitraan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi (PVPV) dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) di Kabupaten Gresik secara sinergis, berkelanjutan, dan mudah diakses sesuai potensi unggulan daerah seperti industri manufaktur, migas, logistik, maritim, dan ekonomi digital.
- b. Meningkatkan peran KADIN Kabupaten Gresik dan asosiasi dunia industri lainnya (Apindo, HIPMI, Himpunan Kawasan Industri, dan lain-lain) melalui program *link and match*, pengembangan keahlian, peningkatan SDM pelatih di tempat kerja, optimalisasi sarana dan prasarana pelatihan industri, serta dukungan riset terapan dalam penyelenggaraan PVPV.

- c. Memperkuat peran pendidikan menengah kejuruan (SMK) melalui penyesuaian program keahlian sesuai kebutuhan industri lokal, peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik, serta pengembangan fasilitas *Teaching Factory* dan program magang industri terstruktur di wilayah Kabupaten Gresik.
- d. Meningkatkan kontribusi pendidikan tinggi vokasi (Politeknik dan Akademi Komunitas) melalui kolaborasi *link and match*, riset terapan, inovasi teknologi, serta pengembangan *dual system education* yang mendukung kebutuhan tenaga kerja terampil dan teknolog terapan di kawasan industri Kabupaten Gresik.
- e. Mengoptimalkan peran lembaga pelatihan vokasi (BLK daerah, LPK, LSP, dan TUK) melalui penyesuaian program pelatihan berbasis kompetensi, peningkatan kapasitas instruktur, penyediaan sarana pelatihan yang relevan, serta percepatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja berbasis BNSP.
- f. Memperkuat dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pengembangan ekosistem vokasi, termasuk melalui penyusunan regulasi daerah, pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV), dan penyediaan pembiayaan berkelanjutan melalui Dana Abadi Vokasi Daerah (*Vocational Endowment Fund*).
- g. Terwujudnya sistem penjaminan mutu penyelenggaraan PVPV yang terstandar dan terintegrasi, mencakup akreditasi lembaga vokasi, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, dan *tracer study* lulusan untuk menjamin kualitas serta daya saing lulusan vokasi Kabupaten Gresik.

C. STRATEGI DAN RENCANA TINDAK REVITALISASI PVPV DAERAH TERDIRI ATAS:

1. Mengembangkan Sistem Informasi Pasar Kerja

Salah satu strategi utama dalam revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Pendidikan Vokasional (PVPV) di Kabupaten Gresik adalah pengembangan *Sistem Informasi Pasar Kerja* yang terintegrasi dalam platform GRESIKERJA. Sistem ini berfungsi sebagai pusat data dan informasi ketenagakerjaan secara *real-time*, yang memberikan gambaran rinci tentang kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri, termasuk jenis jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan lokasi penempatan kerja. Platform GRESIKERJA terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *Informasi Pasar Kerja (IPK) real-time*, *Sistem Pemantauan Keterampilan (Skill Monitoring System/SMS)*, dan *kerangka perencanaan tenaga kerja jangka panjang*.

Melalui sistem ini, lembaga-lembaga penyelenggara PVPV di Kabupaten Gresik dapat menyesuaikan kurikulum, pelatihan, serta program pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Dengan adanya informasi pasar kerja yang mutakhir, penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat mengarahkan peserta didik dan pencari kerja pada bidang-bidang yang sedang dibutuhkan oleh industri lokal, termasuk sektor unggulan seperti manufaktur, kimia, energi, pelabuhan, dan logistik yang menjadi karakteristik utama ekonomi Kabupaten Gresik.

Platform GRESIKERJA juga menjadi sarana bagi DUDIKA untuk secara langsung memasukkan data kebutuhan tenaga kerja, sementara lembaga PVPV menginput ketersediaan calon tenaga kerja yang kompeten. Kolaborasi ini memungkinkan terbangunnya sistem yang responsif terhadap dinamika pasar kerja. Selain melalui sistem daring, penyebaran informasi pasar kerja juga dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melalui media sosial, televisi lokal, serta pelaksanaan *Job Fair* baik secara *online*, *offline*, maupun *hybrid*, yang menjangkau lebih luas para pencari kerja dari kalangan masyarakat dan alumni lembaga vokasi.

Sementara itu, *Skill Monitoring System (SMS)* di Kabupaten Gresik dikembangkan sebagai alat pemantau tingkat keterampilan tenaga kerja berdasarkan data IPK dan analisis kebutuhan industri. Sistem ini membantu menyeimbangkan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, mempercepat waktu tunggu kerja, serta meningkatkan daya tarik investasi di daerah. SMS juga memberi sinyal terkait proyeksi jenis keterampilan yang dibutuhkan di masa mendatang, sehingga lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dapat mempersiapkan tenaga kerja yang relevan dengan arah pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui integrasi antara IPK dan SMS, Pemerintah Kabupaten Gresik menargetkan terbentuknya peta kebutuhan tenaga kerja yang komprehensif dan berkelanjutan. Peta ini menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan, termasuk penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi, peningkatan *link and match* antara lembaga vokasi dan industri, serta penyiapan tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar global. Dengan demikian, pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja GRESIKERJA diharapkan mampu menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang produktif, inklusif, dan berdaya saing tinggi di Kabupaten Gresik.

2. Memperkuat Peran Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) dalam Penyelenggaraan PVPV yang Berorientasi pada Permintaan (*Demand-Oriented TVET*) di Kabupaten Gresik

Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) Kabupaten Gresik memiliki peran strategis dalam memperkuat penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Pendidikan Vokasional (PVPV) yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja (*demand-oriented TVET*). Sebagai wadah bagi para pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi, KADINDA Gresik tidak hanya berperan dalam mendorong penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam memastikan penyelenggaraan sistem pendidikan vokasi yang relevan, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Keterlibatan sektor swasta melalui KADINDA Gresik menjadi krusial dalam menciptakan keselarasan antara dunia pendidikan dan dunia industri, sehingga lulusan lembaga vokasi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan kerja.

Dalam konteks implementasi *Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi PVPV*, KADINDA Gresik diharapkan memainkan peran aktif dalam penyusunan kurikulum berbasis industri, pengembangan standar kompetensi kerja daerah, penyediaan akses magang dan praktik kerja industri, pengakuan sertifikat kompetensi, serta fasilitasi rekrutmen tenaga kerja bagi lulusan lembaga vokasi di wilayah Gresik. Peran ini juga mencakup dukungan terhadap program *praktisi mengajar*, riset terapan, dan pendirian lembaga vokasi yang bermitra dengan industri, sehingga tercipta *link and match* dan bahkan *link and super match* antara dunia pendidikan, pelatihan, dan industri lokal.

Sebagai daerah industri dengan konsentrasi tinggi di sektor manufaktur, petrokimia, energi, semen, pelabuhan, dan logistik, Gresik memerlukan sistem vokasi yang benar-benar berbasis kebutuhan (*demand-driven*). Oleh karena itu, KADINDA Kabupaten Gresik berperan sebagai jembatan koordinasi antara dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) dengan lembaga PVPV melalui Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV). Melalui forum tersebut, KADINDA Gresik turut membangun ekosistem kolaboratif yang mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengurangan tingkat pengangguran, serta tersedianya pelatih tempat kerja yang mandiri dan kompeten.

Untuk mendukung penguatan sistem informasi pasar kerja daerah, KADINDA Gresik juga berperan penting dalam mendorong partisipasi asosiasi dan industri agar secara aktif menyampaikan data kebutuhan tenaga kerja melalui platform GRESIKERJA. Hal ini dilakukan dengan cara membangun kesadaran DUDIKA terhadap manfaat sistem informasi pasar kerja yang akurat, melakukan sosialisasi rutin tentang pentingnya pelaporan kebutuhan tenaga kerja, serta menyusun mekanisme pelaporan dan pembaruan data secara terstruktur dari tingkat perusahaan ke tingkat kabupaten. Langkah ini menjadi kunci dalam memperbaiki ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di Kabupaten Gresik.

Selain itu, KADINDA Gresik diharapkan memperkuat kapasitas kawasan industri dalam pengolahan dan pemanfaatan data pasar kerja melalui pelatihan dan pendampingan teknis bagi perusahaan anggota. Upaya ini bertujuan agar industri tidak hanya menjadi pengguna tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi aktif dalam proses penyusunan kebijakan dan pengembangan ekosistem vokasi. Melalui kegiatan seperti *Certified Behaviour Analyst (CBA)*, pelatihan *trainer industri*, dan program *praktisi mengajar*, KADINDA dapat membantu membangun jejaring kemitraan yang berkelanjutan antara lembaga PVPV dan dunia industri.

Lebih lanjut, KADINDA Gresik juga diharapkan menjadi motor penggerak dalam memperluas akses magang berkualitas di perusahaan-perusahaan mitra industri. Melalui penyediaan tempat magang yang relevan dan berstandar tinggi, peserta didik dari lembaga vokasi dapat memperoleh pengalaman kerja praktis yang memperkuat kompetensi teknis, keterampilan sosial, dan kesiapan mereka memasuki dunia kerja. Sinergi antara KADINDA, lembaga PVPV, dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu membentuk ekosistem vokasi Kabupaten Gresik yang dinamis, produktif, dan berorientasi pada kebutuhan industri masa depan.

3. Mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi Sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja di Kabupaten Gresik

Minat masyarakat Kabupaten Gresik terhadap pendidikan vokasi, khususnya jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan berbasis keterampilan yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja. Fenomena ini perlu direspons dengan penguatan sistem penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah peserta didik, tetapi juga pada kualitas, relevansi, dan daya saing lulusan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen mewujudkan sistem pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi dan selaras dengan kebutuhan pasar kerja lokal, regional, maupun global.

Pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Gresik diarahkan agar mampu mencetak lulusan yang siap kerja, memiliki keahlian teknis sesuai standar industri, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar kerja. Penerapan pendidikan berbasis kompetensi dilakukan melalui penguatan kemitraan antara SMK dan dunia usaha, dunia industri, serta dunia kerja (DUDIKA) dalam kerangka program *link and match* yang konkret dan berkelanjutan. Kemitraan ini mencakup penyusunan kurikulum bersama, program magang dan praktik kerja industri, kegiatan *teaching factory*, serta penyediaan pelatih dari industri yang berperan langsung dalam proses pembelajaran.

Kabupaten Gresik, sebagai salah satu pusat industri terbesar di Jawa Timur dengan sektor unggulan seperti petrokimia, semen, logistik, maritim, energi, dan manufaktur, memiliki potensi besar dalam pengembangan pendidikan vokasi berbasis kompetensi. Namun, kondisi ideal ini masih menghadapi tantangan, antara lain belum sepenuhnya seimbangnya komposisi jurusan di SMK dengan potensi ekonomi wilayah. Banyak sekolah masih membuka program keahlian berdasarkan tren minat siswa, bukan pada kebutuhan riil industri. Untuk itu, perlu dilakukan *reprofiling* jurusan SMK sesuai dengan sektor prioritas daerah, agar lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja Gresik dan sekitarnya.

Selain itu, peningkatan kompetensi bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas SMK menjadi agenda penting. Kualitas tenaga pendidik kejuruan berperan langsung terhadap keberhasilan penerapan pendidikan berbasis kompetensi. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan berupaya mendorong program *upskilling* dan *reskilling* bagi guru SMK, serta mendorong keterlibatan mereka dalam pelatihan di industri sebagai bagian dari program pertukaran pengalaman dan penguatan pembelajaran berbasis praktik.

Sarana dan prasarana pembelajaran di SMK juga terus ditingkatkan agar sesuai dengan standar industri, termasuk melalui dukungan pembangunan *teaching factory* dan laboratorium praktik. Tak kalah penting, sistem penjaminan mutu pendidikan kejuruan perlu diperkuat untuk memastikan kesesuaian antara proses pembelajaran dengan kebutuhan pasar kerja. Penjaminan mutu ini mencakup aspek kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi pengajar, serta hasil lulusan yang tersertifikasi.

Melalui sinergi antara SMK, DUDIKA, KADIN, dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Kabupaten Gresik, diharapkan terbentuk ekosistem pendidikan kejuruan yang terpadu dan dinamis. Kolaborasi ini tidak hanya mendorong peningkatan kualitas lulusan, tetapi juga membuka peluang penempatan kerja, pengembangan wirausaha muda, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sumber daya manusia terampil dan berdaya saing. Dengan demikian, pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Gresik akan benar-benar menjadi motor penggerak dalam mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan produktif sesuai arah pembangunan industri dan ekonomi daerah.

4. Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi yang Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Vokasi Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi Sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja

Pentingnya mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi di Kabupaten Gresik yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi menjadi keharusan strategis, mengingat posisi Gresik sebagai salah satu pusat industri terbesar di Jawa Timur dan bagian integral dari kawasan Gerbangkertosusila. Pembangunan sistem ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga memastikan bahwa kurikulum dan proses pembelajaran benar-benar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDIKA) yang terus berubah. Melalui penguatan program Link and Match antara perguruan tinggi vokasi dan DUDIKA, Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya menciptakan ekosistem pendidikan yang responsif terhadap perkembangan teknologi, digitalisasi industri, dan kebutuhan kompetensi masa depan.

Implementasi sistem ini akan diperkuat dengan peningkatan kapasitas dosen vokasi yang tidak hanya profesional dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dan jejaring yang kuat dengan sektor industri. Dosen dituntut untuk berperan aktif dalam memperluas kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Gresik seperti Kawasan Industri Gresik (KIG), Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE), serta kawasan industri lainnya di Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan. Keberadaan sentra-sentra industri ini menjadi laboratorium nyata bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan praktis melalui program magang, proyek industri, dan penelitian terapan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

Lebih jauh, riset terapan dari perguruan tinggi vokasi di Gresik diharapkan dapat diarahkan untuk memberikan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan industri, seperti efisiensi produksi, pengelolaan limbah, dan transformasi menuju industri hijau. Sinergi antara kampus vokasi dan dunia industri ini akan memperkuat posisi Gresik sebagai pusat pengembangan SDM unggul dan berdaya saing tinggi, yang mampu menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui dukungan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Kabupaten Gresik, penguatan Pendidikan Tinggi dan Pelatihan Vokasi (PTPPV) akan diarahkan pada beberapa agenda prioritas, yaitu penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi industri, penyelenggaraan program magang mahasiswa dan dosen, pemberian sertifikasi kompetensi, peningkatan fasilitas pembelajaran sesuai teknologi industri terkini, pelibatan dosen praktisi, fasilitasi penempatan kerja, hilirisasi riset terapan kolaboratif, serta pengembangan program kewirausahaan bagi lulusan vokasi. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Gresik diharapkan menjadi model daerah yang berhasil mewujudkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang adaptif, relevan, dan berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi berbasis industri dan inovasi.

5. Mewujudkan Pelatihan Vokasi yang Berbasis Kompetensi Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja

Pelatihan vokasi di Kabupaten Gresik memiliki peran yang sangat strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di dunia industri. Sebagai daerah dengan basis industri besar dan beragam, mulai dari sektor manufaktur, petrokimia, logistik, hingga energi, Gresik membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja yang dinamis. Dalam konteks ini, pelatihan vokasi menjadi instrumen yang efektif untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek, karena memiliki fokus yang lebih spesifik pada kompetensi praktis dibandingkan dengan pendidikan vokasi yang menempuh proses lebih panjang.

Pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Gresik diarahkan untuk memastikan kesesuaian antara keterampilan yang diperoleh peserta dengan kebutuhan industri. Pendekatan ini menekankan pada penguasaan kemampuan praktis dan penyelesaian masalah melalui pembelajaran aktif dan proyek langsung di lapangan. Peserta pelatihan tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teknis, tetapi juga dengan kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan berorientasi hasil. Dengan metode ini, pelatihan vokasi diharapkan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja Gresik, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru di sektor industri kecil dan menengah.

Kabupaten Gresik sendiri memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang menjadi pusat utama penyelenggaraan pelatihan vokasi di tingkat daerah, di bawah koordinasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. BLK Gresik secara rutin menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan yang terbuka bagi masyarakat, terutama lulusan SMK, perguruan tinggi vokasi, dan pencari kerja yang belum terserap dunia industri. Namun demikian, tren saat ini menunjukkan bahwa peserta pelatihan justru semakin banyak berasal dari lulusan sarjana, sementara minat lulusan SMK terhadap pelatihan menurun. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi promosi dan reorientasi program pelatihan agar lebih menarik bagi lulusan SMK dan kelompok usia produktif muda.

Dalam praktiknya, pola pelatihan di BLK Gresik mengutamakan pendekatan pelatihan–sertifikasi–penempatan kerja. Namun, prinsip utamanya adalah peningkatan kebermanfaatan peserta, bukan semata-mata penyelesaian jam pelajaran. Dengan demikian, apabila peserta memperoleh pekerjaan di tengah masa pelatihan, hal tersebut tetap dianggap sebagai keberhasilan program. Sejalan dengan perkembangan zaman, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik juga terus memperbaharui jenis pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan industri terkini, seperti pelatihan di bidang *Artificial Intelligence (AI)*, konten kreator digital, digital marketing, dan teknologi energi terbarukan seperti panel surya.

Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan vokasi di Gresik. Pertama, masih terbatasnya minat peserta pada bidang-bidang yang memiliki tingkat penyerapan tinggi di industri, seperti teknisi pendingin udara (AC), las industri, dan otomasi pabrik. Kedua, persoalan sikap kerja (*attitude*) dan kesiapan mobilitas tenaga kerja juga menjadi kendala, di mana sebagian peserta cenderung enggan ditempatkan di luar daerah meskipun peluang kerja tersedia. Ketiga, meningkatnya minat untuk bekerja di luar negeri juga menjadi fenomena tersendiri. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tengah memperluas kerja sama dengan lembaga pelatihan dan mitra penempatan luar negeri untuk memfasilitasi tenaga kerja asal Gresik agar dapat bersaing di pasar global, khususnya di Jepang dan Taiwan. Tantangan utama dalam hal ini adalah peningkatan kemampuan bahasa asing dan kesiapan budaya kerja internasional bagi calon tenaga kerja.

Dengan memperkuat tata kelola pelatihan, meningkatkan kualitas instruktur dan fasilitas, serta memperluas kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), pelatihan vokasi di Kabupaten Gresik diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan produktif, yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta menjawab tantangan ketenagakerjaan di era digital dan globalisasi.

6. Memperkuat Skema Pendanaan untuk Menunjang Penyelenggaraan PVPV yang Efisien, Efektif, dan Berbasis Kebutuhan

Salah satu aspek penting dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Gresik adalah dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi (PVPV) yang efisien, efektif, dan berbasis kebutuhan nyata dunia kerja. Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri di Jawa Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk memastikan efisiensi dan efektivitas skema pendanaan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja serta mampu menjamin keberlanjutan program vokasi di daerah. Dengan adanya pendanaan yang memadai dan tepat sasaran, program-program PVPV di Gresik dapat berjalan optimal, memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik, lembaga penyelenggara, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang menjadi mitra utama dalam ekosistem vokasi daerah.

Pendanaan berbasis kebutuhan di Kabupaten Gresik diarahkan untuk memastikan alokasi sumber daya dilakukan sesuai dengan prioritas dan permintaan kompetensi tenaga kerja dari sektor-sektor produktif yang berkembang di wilayah ini, seperti manufaktur, petrokimia, logistik, energi, dan maritim. Skema ini memungkinkan penyaluran dana disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lembaga vokasi dan sektor industri, sehingga hasilnya dapat langsung berdampak pada peningkatan daya saing tenaga kerja lokal. Dalam hal ini, kontribusi keuangan dari mitra DUDI menjadi elemen penting yang dapat meringankan beban pendanaan penyelenggaraan program vokasi sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri. Pemerintah Kabupaten Gresik dapat mendorong partisipasi DUDI melalui pemberian berbagai bentuk insentif, baik fiskal maupun non-fiskal, dengan mengacu pada peraturan yang berlaku secara nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, yang berkontribusi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki peluang besar untuk memanfaatkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan, yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan skema pembiayaan inovatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui kebijakan ini, pembangunan dan penguatan sistem vokasi di Gresik dapat dibiayai tidak hanya melalui dana APBD, tetapi juga melalui kemitraan antara pemerintah dan badan usaha (*Public Private Partnership/PPP*), kerja sama pendanaan pendidikan dengan sektor industri, serta pemanfaatan sumber pembiayaan sah lainnya.

Untuk menjamin transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana, pengembangan sistem dan mekanisme akuntabilitas berbasis otonomi lembaga vokasi menjadi hal yang sangat penting. PVPV di Kabupaten Gresik perlu diberikan keleluasaan dalam mengelola keuangan secara mandiri namun tetap akuntabel, sehingga pengelolaan dana dapat dilakukan secara profesional, fleksibel, dan berorientasi hasil. Pemberian otonomi keuangan ini akan memperkuat posisi lembaga vokasi sebagai subjek aktif dalam sistem pendanaan, bukan sekadar penerima pasif. Lembaga vokasi juga akan lebih leluasa dalam menyesuaikan penggunaan anggaran untuk kebutuhan pengembangan kurikulum, peralatan pelatihan, peningkatan kompetensi instruktur, serta kemitraan dengan industri.

Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dapat berperan dalam mengembangkan peraturan turunan dan panduan teknis agar skema pendanaan vokasi dapat diimplementasikan secara operasional di tingkat daerah. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pembiayaan PVPV di Kabupaten Gresik menjadi lebih berkelanjutan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja, serta mampu mendukung terciptanya tenaga kerja lokal yang kompeten, produktif, dan siap menghadapi tantangan industri masa depan.

RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*) STRATEGI DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI DI KABUPATEN GRESIK 2025–2029

Strategi 1. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola				
Sararan	Rencana Tindak	Target	Tahun	Penanggung Jawab Daerah
<p>Terbentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) yang berfungsi aktif dan terintegrasi lintas perangkat daerah, lembaga pendidikan, dan industri.</p> <p>Tersedia regulasi daerah pendukung vokasi (Perbup, SK, MoU) yang mengatur sinergi pemerintah–industri–pendidikan.</p> <p>Terbangun sistem informasi pasar kerja daerah yang terhubung dengan SISNAKER nasional, menyediakan data real-time tenaga kerja dan kebutuhan industri.</p> <p>Terselenggara evaluasi kelembagaan yang memastikan keberlanjutan program vokasi pasca-2029.</p>		<p>Pembentukan TKDV Kabupaten Gresik</p>	2025	
		<p>Terbit Perbup dan SK TKDV</p>		
		<p>Penandatanganan MoU vokasi dengan industri</p>		
	<p>Revisi kurikulum SMK dan BLK sesuai SKKNI dan kebutuhan lokal.</p>	<p>Penguatan sekretariat TKDV</p>	2026	
		<p>Pembangunan awal database tenaga kerja dan kebutuhan industri</p>		
	<p>Implementasi <i>Teaching Factory</i> di minimal 5 SMK dan 2 perguruan tinggi vokasi.</p>	<p>100% sekretariat TKDV operasional</p>	2027	
		<p>Database tenaga kerja dan industri terisi minimal 70% data akurat</p>		

	Penambahan program magang industri terstruktur dengan minimal 20 perusahaan.	Integrasi sistem informasi pasar kerja daerah GRESIKERJA dengan SISNAKER nasional	2028	
	Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi dengan tren global (<i>green jobs</i> , digitalisasi).	Review dan evaluasi kelembagaan TKDV	2029	
		Rekomendasi kelembagaan berkelanjutan pasca 2029		

Strategi 2. Pengembangan Kurikulum dan <i>Link and Match</i>				
Sararan	Rencana Tindak	Target	Tahun	Penanggung Jawab Daerah
<p>100% kurikulum SMK dan BLK di Gresik selaras dengan SKKNI dan kebutuhan industri lokal (manufaktur, migas, logistik, digital, maritim).</p> <p>Implementasi <i>Teaching Factory</i> di minimal 5 SMK dan 2 perguruan tinggi vokasi berjalan efektif.</p> <p>Minimal 20 perusahaan terlibat dalam program magang dan pelatihan industri terstruktur.</p> <p>Kurikulum telah mengadopsi tren global seperti <i>green jobs</i> dan <i>digital transformation</i>.</p>	<p>Pemetaan kebutuhan kompetensi industri di Gresik (manufaktur, migas, logistik, digital, maritim).</p>	<p>Pemetaan kebutuhan kompetensi industri (5 sektor prioritas: manufaktur, migas, logistik, digital, maritim)</p>	2025	
	<p>Revisi kurikulum SMK dan BLK sesuai SKKNI dan kebutuhan lokal.</p>	<p>Revisi kurikulum SMK dan BLK sesuai SKKNI dan kebutuhan lokal</p>	2026	
	<p>Implementasi <i>Teaching Factory</i> di minimal 5 SMK dan 2 perguruan tinggi vokasi.</p>	<p>Implementasi <i>Teaching Factory</i> di 5 SMK dan 2 PT vokasi</p>	2027	
	<p>Penambahan program magang industri terstruktur dengan minimal 20 perusahaan.</p>	<p>Penambahan 20 perusahaan mitra magang industri</p> <p>Implementasi structured internship program</p>	2028	
	<p>Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi dengan tren global (<i>green jobs</i>, digitalisasi).</p>	<p>Evaluasi kurikulum berbasis kompetensi</p> <p>Adopsi unsur <i>green jobs</i> dan digitalisasi dalam kurikulum</p>	2029	

Strategi 3. Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Instruktur				
Sararan	Rencana Tindak	Target	Tahun	Penanggung Jawab Daerah
<p>Seluruh guru SMK, dosen vokasi, dan instruktur BLK telah dipetakan kualifikasinya dan mengikuti program <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>. Minimal 70% tenaga pendidik dan instruktur bersertifikat kompetensi industri (BNSP). Terlaksana program pertukaran guru/ instruktur dengan industri, menghasilkan peningkatan mutu pembelajaran berbasis praktik industri.</p>	Pemetaan kualifikasi guru SMK, dosen vokasi, dan instruktur BLK.	Pemetaan kualifikasi guru SMK, dosen vokasi, dan instruktur BLK	2025	
	Program pelatihan <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> bagi guru/ instruktur.	Pelaksanaan program <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> bagi minimal 200 guru/instruktur	2026	
	Program sertifikasi kompetensi pendidik dan instruktur.	Sertifikasi kompetensi bagi minimal 300 guru/ instruktur	2027	
			50% tenaga pendidik bersertifikat industri	
	Program pertukaran guru/instruktur dengan industri.	Program <i>industry exchange</i> bagi minimal 50 guru/instruktur	2028	
Evaluasi kinerja dan ketersediaan tenaga pendidik dan instruktur berstandar industri.	70% pendidik dan instruktur berstandar industri	Evaluasi mutu SDM pendidik secara berkala	2029	

Strategi 4. Peningkatan Akses Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi				
Sararan	Rencana Tindak	Target	Tahun	Penanggung Jawab Daerah
<p>Terselenggara pelatihan berbasis kompetensi untuk lebih dari 10.000 pencari kerja sepanjang periode 2025–2029.</p> <p>Terbentuk minimal 4 Tempat Uji Kompetensi (TUK) baru di wilayah Gresik. 50% tenaga kerja Gresik telah memiliki sertifikat kompetensi BNSP, meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah di tingkat nasional.</p>	<p>Pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi di BLK daerah untuk 1.000 pencari kerja.</p>	<p>Pelatihan berbasis kompetensi untuk 1.000 pencari kerja</p>	2025	
	<p>Pendirian minimal 2 Tempat Uji Kompetensi (TUK) baru di Gresik.</p>	<p>Pendirian 2 TUK baru di Gresik</p>	2026	
		<p>Pelatihan untuk 2.000 peserta</p>		
	<p>Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi untuk 5.000 tenaga kerja.</p>	<p>Sertifikasi kompetensi untuk 5.000 tenaga kerja</p>	2027	
	<p>Kerjasama dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) nasional untuk memperluas akses sertifikasi.</p>	<p>Kerjasama aktif dengan LSP nasional</p>	<p>Pelatihan dan sertifikasi 3.000 tenaga kerja tambahan</p>	2028
<p>Target 50% tenaga kerja Gresik memiliki sertifikat kompetensi BNSP.</p>		<p>50% tenaga kerja Gresik memiliki sertifikat kompetensi BNSP (sekitar 60.000 orang)</p>		2029

Strategi 5. Pengembangan Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Industri				
Sararan	Rencana Tindak	Target	Tahun	Penanggung Jawab Daerah
<p>Terbentuk <i>Industry Advisory Council</i> sebagai wadah koordinasi berkelanjutan antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan vokasi.</p> <p>Terlaksana skema <i>co-funding</i> dan <i>dual system training</i> antara BLK dan industri.</p> <p>Minimal 70% program vokasi di Gresik telah berbasis <i>link and match</i> dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri.</p>	MoU dengan KADIN, Apindo, dan minimal 10 perusahaan besar di Gresik.	MoU dengan KADIN, Apindo, dan 10 perusahaan besar	2025	
	Pendirian <i>Industry Advisory Council</i> untuk pendidikan vokasi daerah.	Pembentukan <i>Industry Advisory Council (IAC)</i> daerah	2026	
	Skema pendanaan bersama (<i>co-funding</i>) pelatihan dengan industri.	Pelaksanaan <i>co-funding training scheme</i> dengan minimal 5 industri	2027	
	Implementasi <i>dual system training</i> (pelatihan di BLK dan industri).	Implementasi <i>dual system training</i> di BLK dan industri	2028	
	70% program vokasi di Gresik berbasis <i>link and match</i> dengan industri.	70% program vokasi di Gresik telah berbasis <i>link and match</i>	2029	

Strategi 6. Inovasi dan Pembiayaan				
Sararan	Rencana Tindak	Target	Tahun	Penanggung Jawab Daerah
<p>Terbentuk Dana Abadi Vokasi Daerah (Vocational Endowment Fund) untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan pelatihan dan inovasi vokasi.</p> <p>Diterapkan Public-Private Partnership (PPP) dalam pembangunan fasilitas pelatihan vokasi dan peningkatan sarana BLK.</p> <p>Tersedianya mekanisme pendanaan alternatif dari CSR, hibah pelatihan, dan dana bergulir yang mendukung keberlanjutan pelatihan vokasi.</p>	Penyusunan skema pendanaan inovatif (CSR, dana bergulir, hibah pelatihan).	Penyusunan skema pendanaan inovatif (CSR, dana bergulir, hibah pelatihan)	2025	
	Pilot project pembiayaan bersama CSR perusahaan kawasan industri.	Pelaksanaan <i>pilot project co-funding</i> dengan kawasan industri	2026	
	Pendirian Dana Abadi Vokasi Daerah (Vocational Endowment Fund).	Pembentukan <i>Dana Abadi Vokasi Daerah</i>	2027	
	Implementasi <i>Public-Private Partnership (PPP)</i> dalam pembangunan fasilitas vokasi.	Implementasi <i>Public-Private Partnership (PPP)</i> pembangunan fasilitas pelatihan	2028	
	<i>Review</i> keberlanjutan skema inovasi pembiayaan vokasi daerah.	Review efektivitas dan keberlanjutan skema pembiayaan inovatif	2029	

Strategi 7. <i>Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan</i>				
Sasaran	Rencana Tindak	Target	Tahun	Penanggung Jawab Daerah
Tersedia dashboard digital monitoring vokasi berbasis <i>Indikator Kinerja Daerah Vokasi (IKD-Vokasi)</i> . Dilaksanakan Tracer Study terintegrasi untuk SMK, Politeknik, dan BLK guna menilai serapan tenaga kerja. Terbit Laporan Akhir Rencana Aksi 2025–2029 dan penetapan Roadmap 2030–2034 berdasarkan hasil evaluasi berbasis data.	Penyusunan indikator kinerja daerah vokasi (IKD-Vokasi).	Penyusunan <i>Indikator Kinerja Daerah Vokasi (IKD-Vokasi)</i>	2025	
	Implementasi sistem monitoring digital berbasis dashboard.	Pengembangan dan implementasi sistem monitoring digital (dashboard)	2026	
	Tracer study pertama untuk lulusan SMK, Politeknik, BLK.	<i>Tracer Study</i> pertama untuk lulusan SMK, Politeknik, BLK	2027	
	Evaluasi capaian strategi daerah, rekomendasi kebijakan baru.	Evaluasi capaian strategi vokasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan baru	2028	
	Penyusunan Laporan Akhir Rencana Aksi 2025–2029 dan penetapan roadmap 2030–2034.	Penyusunan Laporan Akhir Rencana Aksi 2025–2029 dan <i>Roadmap</i> 2030–2034	2029	

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REVITALISASI PVPV

Keberhasilan revitalisasi PVPV sangat bergantung terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara teratur terhadap efektivitas program. Dengan adanya mekanisme ini, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan serta mengevaluasi capaian yang telah dicapai. Provinsi dapat menerapkan berbagai metode pemantauan yang inklusif, seperti survei kepada peserta, pemantauan langsung terhadap proses pembelajaran, dan analisis data statistik terkait kualitas lulusan dan penempatan kerja.

Selain itu, evaluasi juga harus melibatkan stakeholder terkait, termasuk industri dan masyarakat umum, untuk mendapatkan masukan yang berharga dan memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan pasar kerja. Pemantauan dan evaluasi revitalisasi PVPV adalah proses yang sangat penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan, meningkatkan capaian keberhasilan, serta mendapatkan umpan balik dari penerima manfaat program. Pemantauan dan evaluasi berfungsi sebagai instrumen kunci untuk menilai kinerja program dan membuat perubahan yang diperlukan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa contoh, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Evaluasi juga berfungsi sebagai tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

E. PENUTUP

Perencanaan Strategi Revitalisasi PVPV Kabupaten Gresik ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia melalui:

1. penekanan fokus pada mutu dan relevansi lulusan yang berorientasi pada permintaan (*demand oriented TVET*);
2. penguatan tata kelola penyelenggaraan PVPV;
3. penjaminan mutu;
4. penguatan pendanaan; dan
5. penguatan koordinasi para pihak terkait yang memiliki peran kunci dalam penyelenggaraan PVPV yang berkualitas di Kabupaten Gresik.

Dokumen ini menjadi penjabaran visi dan misi TKDV yang selaras dengan agenda nasional di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi, sekaligus menggambarkan hubungan antara sasaran strategis, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan target keluaran sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi.

Dengan dinamika industri Kabupaten Gresik yang terus berkembang mulai dari manufaktur, petrokimia, semen, logam, agribisnis, hingga industri maritim dan Kawasan Industri yang ada di Kabupaten Gresik yang memiliki kebutuhan terhadap SDM terampil dan tersertifikasi semakin meningkat. Kehadiran 15 Perguruan Tinggi dan 60 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Gresik menjadi potensi penting dalam upaya memenuhi permintaan tenaga kerja industri melalui penyediaan program vokasi mulai dari SMK hingga Diploma 4 yang menjadi penyumbang terbesar SDM terampil. Kompetensi para dosen yang tersebar pada jenjang Profesi, S2 Akademik, S2 Terapan, hingga S3 Akademik, serta berbagai sertifikasi profesi dan industri yang dimiliki, memperkuat kapasitas perguruan tinggi vokasi dalam mempersiapkan lulusan yang sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri.

Dokumen Perencanaan Strategi ini menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik untuk mewujudkan penyelenggaraan PVPV yang berkualitas, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah pada periode 2024–2029.

Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, satuan pendidikan vokasi, dunia usaha dan industri, asosiasi profesi, serta masyarakat, diharapkan Kabupaten Gresik dapat semakin unggul dalam menciptakan SDM yang kompeten, produktif, dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI